

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH (PSAK No. 101 DAN No. 105) PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensif Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**TITIK TASMOYO PUTRI**

**10873001596**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH (PSAK No. 101 DAN No. 105) PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS**



**OLEH:**

**TITIK TASMOYO PUTRI**

**10873001596**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

### ***ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH (PSAK NO101 DAN NO. 105) PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS***

***Oleh:***

***Titik Tasmoyo Putri  
10873001596***

*PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkreditan rakyat syariah. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan akuntansi mudharabah yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).*

*Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara, yaitu: menghubungi langsung pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan penjelasan mengenai penerapan akuntansi mudharabah diperusahaan tersebut.*

*Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan akuntansi mudharabah pada perusahaan yaitu: cara perhitungan bagi hasil perusahaan menggunakan total pendapatan usaha (omset), seharusnya perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit), perusahaan menggabungkan dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan tidak mencatat pinjaman qardh kedalam laporan keuangan.*

*Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan akuntansi mudharabah pada perusahaan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.*

***Kata kunci : Bagi Hasil, Pendapatan Usaha, Laba Bruto, dan Dana Syirkah Temporer.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akuntansi .....	11
B. Bank Syari'ah .....	19
C. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) .....	23
D. Produk Perbankan BPR Syari'ah .....	26
E. Bagi Hasil .....	27
F. Mudharabah .....	34
G. Akuntansi Mudharabah .....	37
H. Contoh Transaksi Mudharabah .....	37
I. Pinjaman Qardh (Dana Kebajikan) .....	42
<b>BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BPRS .....	43
B. Struktur Organisasi Perusahaan .....	48
C. Aktivitas Perusahaan .....	52

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Akuntansi Mudharabah .....	56
B.	Penyajian Dana Syirkah Temporer .....	58
C.	Pinjaman Qardh (Dana Kebajikan).....	61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	63
5.3	Saran-Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel. II.1	Contoh Metode Bagi Hasil.....	34
Tabel. II.2	Contoh Akad Mudharabah .....	38
Tabel. II.3	Contoh Akad Investasi Mudharabah.....	39
Tabel. II.4	Contoh Realisasi Laba Bruto .....	39
Tabel. II.5	Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 1 .....	40
Tabel. II.6	Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 2 .....	41
Tabel. IV.1	Neraca Setelah dikoreksi.....	59
Tabel. IV.2	Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini masyarakat Islam di Indonesia umumnya dan Pekanbaru khususnya semakin mudah menemukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem syariah. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsi-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan aturan-aturan agama Islam dan di dasari dengan tauhid sebagaimana dalam rukun Islam yang bertujuan untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat (Nadrattuzaman Hosen : 2006: 1).

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal demikian sesuai dengan ajaran Islam yang memang diperuntukkan untuk sekalian alam ( Heri Sudarsono : 2004:7).

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir



:2002:2 ). Berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan bank dibedakan dalam 2 macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah (Kasmir :2002:37).

Perbedaan pokok dari kedua jenis ini adalah dalam hal penentuan harga. Bank konvensional dalam menentukan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan untuk bank syari'ah berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam sistem bagi hasil, baik untung maupun rugi (Muhammad Syafi'i Antonio: 2001:1).

Lembaga keuangan syari'ah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syari'ah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah ( BPRS ) dan lembaga keuangan syari'ah yang bukan bank meliputi Takaful ( asuransi ), Ijarah ( leasing ), Rahn (penggadaian ), Reksa Dana Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK) Syari'ah, dan Baitul Maal wa Tamwil ( BMT ).

Bank syari'ah adalah bank yang sistem operasional dan produknya dikembangkan atas dasar ketentuan syari'ah, secara khusus yang menyangkut tata cara bermuamalah. Bank syari'ah tidak menggunakan bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah, pada sistem operasional bank syari'ah pemilik dana yang menginvestasikan uangnya di bank bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Didalam bank syari'ah terdapat produk bagi hasil salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan ( tabungan dan deposito). *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan

pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (Rizal Yahya, dkk:2009;59). Berdasarkan *mudharabah*, bank syari'ah berfungsi sebagai mitra baik dengan pihak penabung maupun pihak penjamin dana. Bank akan berperan sebagai pengelola dana dan pihak penabung berperan sebagai pemilik dana. Dilain sisi, dengan pihak peminjam dana, bank berperan sebagai pemilik dana dan pihak peminjam dana berfungsi sebagai pengelola dana.

Bank membutuhkan dana investasi dalam jumlah besar untuk pelaksanaan sistem kerjanya, oleh karena itu diperlukan pemilik dana yang banyak pula untuk pelaksanaan kegiatan suatu usaha tertentu. Bank syari'ah menggunakan *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak dimana bank menjadi perantara didalamnya. Siklus transaksinya dimana bank menerima dana dari pemilik dana sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebagai sumber dana dalam bentuk tabungan dan deposito *mudharabah* kemudian disalurkan pada pembiayaan yang dapat menghasilkan ( *earning asset* ). Keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagi hasilnya antara bank dan pemilik dana pihak ketiga.

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) terbagi menjadi tiga yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.

Didalam konsep *mudharabah* terdapat dua metode dasar perhitungan yaitu, bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan salah satu prinsip syariah dalam penawaran produknya kepada nasabah dalam menghimpun dana sedang untuk pembiayaan menggunakan sistem jual beli.

Dari hasil analisa dan wawancara, terdapat masalah-masalah di dalam BPRS BERKAH seperti:

1. permasalahan dalam pembagian bagi hasil mereka berdasarkan dari total pendapatan usaha pada periode tersebut. Seharusnya dari pihak BPRS BERKAH membagi pembagian hasil usahanya berdasarkan laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Menurut PSAK No. 105 paragraf 11 “pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*”.

2. Pada PSAK No. 105 paragraf 25 di jelaskan bahwa “dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer”. Didalam pos neraca yang dibuat oleh pihak BPRS Berkah tercatat sebagai dana investasi tidak terikat, dimana pada PSAK No. 101 pada format neracanya dicatat sebagai dana syirkah temporer dan dana syirkah temporeranya dibagi menjadi dua yaitu dana syirkah temporer dari bukan bank dan dana syirkah temporer dari bank dan kedua dana tersebut dipisahkan dalam pencatatannya, sedangkan pada BPRS Berkah antara dana syirkah temporer yg dari bukan bank dan dari bank di gabungkan menjadi satu. Seharusnya pihak BPRS Berkah memisahkan antara dana syirkah temporer dari bukan bank dan dari bank sesuai dengan yang telah dijelaskan.
3. Didalam laporan neraca perusahaan tidak memasukkan pinjaman qardh kedalam pos aset, seharusnya perusahaan memasukkan kedalam laporan neraca karena akan menambah aset.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul “ **ANALISIS PENERAPAN PSAK No.101 DAN No.105 TERHADAP AKUNTANSI SYARIAH PADA PT. BPR SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah: “ Apakah akuntansi syariah (PSAK No.101 dan

No.105) yang diterapkan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Air Tiris telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS sudah menerapkan akuntansi syariah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat menambah pengalaman dan mempraktekkan ilmu dan teori yang penulis dapat di bangku kuliah khususnya menyangkut masalah penerapan Akuntansi syariah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program strata satu ( S1 ) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH Air Tiris, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun pelengkap terhadap berbagai pengetahuan di bidang perbankan syariah.
4. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## **D. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang berkedudukan di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 depan SMU 2 Kampar Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar-Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada 7 februari 2012 sampai dengan selesai.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) bahwa data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data *original*. Data primer penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pihak BPRS Berkah dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data yang telah diproses yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu seperti laporan keuangannya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, metode yang digunakan yaitu:

#### a. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko (2009:83) bahwa wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.

Sedangkan menurut Nasution (2011:127) wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya. Jadi, wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka dan berbicara secara langsung kepada pihak-pihak yang memberikan opini tentang permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 4. Analisa Data

Menurut Uma Sekaran (2006:175) bahwa analisis data merupakan tahap untuk menemukan permasalahan yang mungkin terdapat didalam data tersebut setelah data berhasil dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data analisis deskriptif. Menurut Rahimsyah (2009:120) menyatakan dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang sesuatu sesuai kenyataan yang ada. Sehingga dengan analisis deskriptif ini dapat dimulai

dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi data, selanjutnya menganalisis tata cara serta penyajian laporan hasil penelitian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan permasalahan di atas maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum perusahaan, yakni mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi murabahah, penyajian laporan sumber dan penggunaan dana



kewajiban, akuntansi mudharabah, dan penyajian laporan keuangan BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan dan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akuntansi**

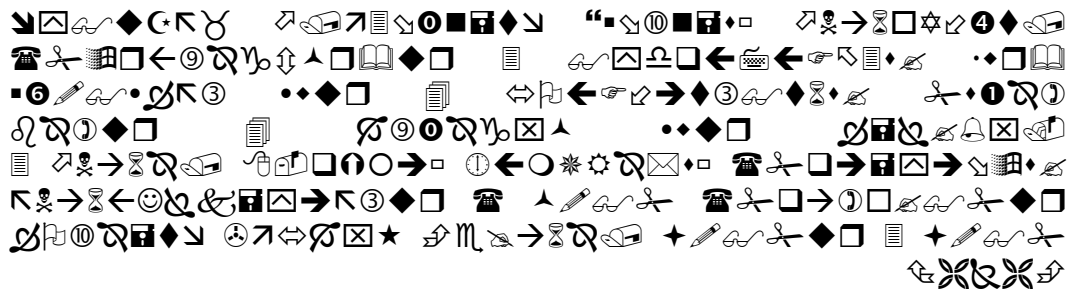
APB (*Accounting Principle Board*) Statment No. 4 Muhammad (2005:10) mendefenisikan sebagai berikut: “ Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk menggunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif .”

American Accounting Association mendefenisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut Ralph Estes (*Kamus Akuntansi Edisi Kedua*) dalam TM Husni Kholil (2007:2) akuntansi mempunyai pengertian sebagai berikut : Akuntansi adalah aktifitas yang menyediakan informasi, biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditor, instansi yang berwenang serta masyarakat.

Defenisi lain mengenai akuntansi terdapat dalam Eddy Mulyadi Soepardi (2006:4) yang mengatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam





Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas perintah dalam ayat ini adalah

untuk menjaga keberatan dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diinginkan. Sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Dalam akuntansi yang menggunakan konsep double entry, didalam Islam sendiri sudah terdapat ayat menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Adz-zariyat: 49 yang berbunyi:



Artinya: *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Secara umum Muhammad Akhram Khan merumuskan karakteristik akuntansi syariah yang dalam buku Harahap (2004:186) sebagai berikut:

- a. Penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.
- b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan  
Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.
- c. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjutnya atau tidaknya suatu organisasi.

d. Keterikatan para keadilan

Informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat, menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

e. Melaporkan dengan benar

Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan dianggap dari sudut pandang yang lebih luas (pada dasarnya bertanggungjawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.

f. Perubahan dalam praktek akuntansi

Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip umum yang perlu dipegang teguh dalam pelaksanaannya sehari-hari yaitu:

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban (*accountability*) menurut Harahap (2002:65) yaitu: merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani *amanah* oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhilafahan tersebut adalah menjalankan atau menunaikan *amanah*. Implikasi dalam bisnis harus melakukan pertanggung jawaban apa yang terkait. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

## 2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang inheren melekat dalam *fitrah* manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, kata keadilan menurut Siregar (2003:79) dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.
- b. Kata adil bersifat lebih *fundamental* (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk upaya-upaya dekontruksi terhadap bangunan akuntansi modern menuju pada bangunan akuntansi alternatif yang lebih baik.

## 3. Prinsip kebenaran

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan

keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Selanjutnya Syahatah (2004:390) menjelaskan beberapa prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun neraca keuangan, yaitu:

*a. Amanah*

Orang-orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus bersifat *amanah* dan semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Ia hendaknya memeparkan apa-apa yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar'i. Oleh karena itu seorang akuntan yang memberikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsuan data, penipuan dan pembodohan dianggap sebagai penghianat terhadap amanah yang telah diterimanya sebagai orang yang dipercaya untuk menyusun data-data hitungan akhir tahun dan neraca keuangan.

*b. Mishdaqiah* (sesuai realitas)

Keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realitas serta tidak ada kebodohan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian.

*c. Diqqah* (cermat dan sempurna)

pengertian dari *diqqah* adalah berbuat sebaik-baiknya dan menyempurnakan pekerjaan. Diantara syarat-syarat *diqqah* "ketelitian dan kesempurnaan" dalam menyiapkan hitungan-hitungan neraca keuangan adalah harus mematuhi atau komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi akuntansi,



peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan secara syar'i. Diqqah juga tidak mungkin terealisasi kecuali akuntannya bersifat amanah, jujur dan mengetahui batasan-batasan tugasnya serta bagaimana ia menjalankannya. Seorang akuntan juga harus meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengalaman dan ahli jika keadaan menuntut begitu. Sebagaimana ia juga mesti memerlukan bantuan dengan metode-metode atau perangkat-perangkat ilmiah yang dapat mewujudkan keadaan *diqqah*, seperti sebuah mesin hitung atau komputer.

*d. Tauqid* (penjadwalan yang tepat)

Yang dimaksud dengan *tauqid* adalah hasil-hasil hitungan dan neraca-neraca keuangan dapat diselesaikan batas-batas waktu yang ditetapkan tanpa mengalur-alur waktu sehingga tidak mengurangi manfaat dan efisiensi kerja juga mencantumkan penanggalan dalam laporan itu.

*e. Adil*

Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan sikap komitmen seorang akuntan yaitu yang akan menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran lebih utama untuk diikuti.

*f. Tibyan* (trasparan)

Pengertian *tibyan* adalah penyajian data-data yang jelas dan tidak ada keterangan apapun yang disembunyikannya terhadap pengguna data-data tersebut, yang tentunya masih dalam batas-batas kaidah yang lalu yaitu amanah, jujur, diqqah, cermat dan sempurna, tauqid (penjadwalan yang tepat) dan adil.

## **B. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Ismail (2009:12) bank mempunyai pengertian sebagai berikut :“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank Syariah adalah bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Warkum Soemitro, 2004:5)

Menurut Slamet Wiyono (2005:75), “Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.” Dalam hal ini praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dijaui, untuk diganti dengan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, dimana sisitem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Perbankan syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sisitem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan “bagi hasil” yang unsur immaterialnya. Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan

syari'ah karena akan berdampak pada pertanggung jawaban seseorang di dunia dan akhirat kelak. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ekonomi syari'ah dikenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu : *shiddiq* (benar, jujur), *tabliq* (transparansi), *amanah* (terpercaya), *istiqamah* (akuntabel, konsistensi) dan *fathanah* (pengembangan diri).

Prinsip utama bank syari'ah adalah harus menuju pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syari'ah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.

Landasan utama perbankan syari'ah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran dan kegigihan untuk meraih kesuksesan. Sedangkan, penentu utamanya adalah sumber dana, sumber daya manusia, mitra utama dan perkembangan teknologi.

## 2. Ciri-Ciri Bank Syari'ah

- a. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- c. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisi utang walaupun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah Swt.
- e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi dari sudut syari'ah. Selain itu, manajer dan pimpinan Bank Islam harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam.
- g. Fungsi kelembagaan Bank Syari'ah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

### 3. Akad dan Aspek Legalitas Bank Syari'ah

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syari'ah baik dalam barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- a. Rukun, seperti : penjual, pembeli, barang, pembeli, harga dan akad/ijab qabul.
- b. Syarat : barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

#### 4. Fungsi Bank Syari'ah

Dalam Bambang Rianto Rustam (2008:7) Bank Syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

##### a. Manajer Investasi

Bank Syari'ah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.

##### b. Investor

Bank Syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan investasi.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.

d. Pengembangan Fungsi Sosial

Bank Syari'ah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai ketentuan berlaku.

### **C. BPR ( Bank Perkreditan Rakyat)**

a. BPR dan BPR Syariah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, definisi BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Perbedaan BPR Syariah dan BPR Konvensional

Perbedaan BPR Syariah dan BPR Konvensional dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Dari segi akad dan legalitas

BPR Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan Al-qur'an, Al-hadist dan ijma' yang mengikat bagi semua pemeluk Islam dan hukum positif adalah keseluruhan

norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, nyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan BPR konvensional berdasarkan hukum positif. Hukum positif adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, nyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

## 2. Dari segi lembaga penyelesaian sengketa

BPR syariah jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka BPR syariah dapat merujuk ke Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimana penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan BPR konvensional jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka BPR konvensional merujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimana penyelesaiannya dilakukan di pengadilan umum.

## 3. Dari segi organisasi

BPR syariah mempunyai Dewan Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sedangkan BPR konvensional tidak mempunyai Dewan Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## 4. Dari segi investasi

BPR syariah didalam melakukan investasi tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu BPR syariah tidak akan mungkin membiayai hal-hal yang diharamkan. Sedangkan BPR konvensional didalam melakukan investasi tidak melihat halal dan haram.

5. Dari segi prinsip operasional

BPR syariah dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat menggunakan bagi hasil (*mudharabah*) dan penyaluran dana masyarakat menggunakan bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), dan *ijarah* (sewa). Sedangkan BPR konvensional dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan bunga.

6. Dari segi tujuan

BPR syariah tujuannya mencari *profit* dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Sedangkan konvensional hanya mencari *profit* semata.

7. Dari segi hubungan nasabah

BPR syariah mempunyai hubungan kemitraan. Sedangkan BPR konvensional mempunyai hubungan debitor dan kreditor.

c. Tujuan BPR Syariah

Tujuan operasional BPR syariah adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.



3. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. (Sumitro, 2004:129)

#### **D. Produk Perbankan BPR Syariah**

##### **a. Produk penghimpunan dana BPR Syariah**

Penghimpunan dana BPR Syariah berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional BPR Syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah:

##### **1. Prinsip *wadi'ah***

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan.

##### **2. Prinsip *mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dana *mudharabah* digunakan untuk produk pembiayaan atau produk penyaluran dana BPR Syariah.

##### **b. Produk penyaluran dana BPR syariah**

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

#### **E. Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Perbankan syariah mempunyai perbedaan dengan non syariah, hal yang paling mendasar pada pembagian dan pengembalian keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah atau yang diberikan nasabah kepada bank. Sebagai mana yang dikemukakan oleh para ahli perbankan syariah mengenai bagi hasil. Sebagai berikut:

Menurut Antonio, dkk (2002:18) bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana.

Dari definisi diatas dapat memberikan makna bahwa bagi hasil, terjadinya kontrak kerja sama, dimana pihak-pihak yang terlibat mengadakan kesepakatan atas hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan. Hubungan yang terjadi didalam kontrak kerja sama tersebut adalah pemodal dengan pengelola modal.

Dalam bagi hasil antara penyedia dana dan pengelola dana adalah sebagai rekanan kerja yang melakukan kontrak sebelumnya tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama. Pihak penyedia dana menanggung resiko berupa tenaga yang dipergunakan dan waktu yang telah terpakai untuk mengelola modal.

Jadi, dalam kegiatan usaha bersama jika terjadi resiko, bila dikaitkan dengan prinsip bagi hasil maka kedua belah pihak akan menanggung resiko dalam keuntungan atau kerugian.

## 2. Metode Bagi Hasil

Antara pemilik dana dan pengelola dana saling memberikan kontribusi atas kegiatan usaha dalam transaksi bagi hasil. Hak antara kedua belah pihak akan timbul ketika usaha dalam pengelolaan dana memberikan keuntungan atau pendapatan. Bagi hasil atas keuntungan atau pendapatan tersebut, sesuai kesepakatan kedua belah pihak dapat menentukan bagi hasil itu akan dilakukan atas keuntungan atau pendapatan.

Dalam pengelolaan dana perhitungan bagi hasil, menurut Zulkifli (2002:59) dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang berbasis perhitungannya adalah profit yang diterima bank, sedangkan *revenue sharing*, basis perhitungan adalah pendapatan bank.

Menurut Sudarsono (2004:124), *profit sharing* didefinisikan sebagai berikut: seluruh pendapatan, baik hasil investasi maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank yang telah dipergunakan.

Selanjutnya Sudarsono (2004:136), *revenue sharing* adalah proses distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhirungkan biaya operasional yang ditanggung bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk pendapatan fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Dalam prakteknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). (Wiyono, 2005:56-57)

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp. 1.000,- dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700,- maka *profit* atau laba adalah Rp. 300,- (Rp. 1.000,- - Rp. 700,-).

b. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp. 1.000,- dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700,- maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp. 1.000,- (tanpa dikurangi beban Rp. 700,-).

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau

labanya kecil maka pemilik dan juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula. Jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dan menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bentuk konvensional deposan/ pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau dilihat dari aspek ekonomi saja maka *profit sharing* mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/ konvensional yang notabene diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*. (Wiyono, 2005:57)

Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi, bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidak adilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena

terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian. (Wiyono, 2005:58)

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana investor tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola bank syariah, BPR syariah atau BMT.

### 3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Wiyono, 2005:59)

### 4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut: (Wiyono, 2005:59)

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang memiliki, misalnya tabungan *mudharabah* dan investasi *mudharabah*.
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2003.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

## 5. Nisbah Bagi Hasil

Keuntungan atau pendapatan dalam prinsip bagi hasil harus didistribusikan diantara mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan sebagai suatu persentase atau proporsi. Bank syariah menetapkan nisbah untuk pembagian

keuntungan yaitu yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha.

Menurut Sudarsono (2004:99), nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian, pembagian hasil atas keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang terlibat dalam suatu kontrak investasi akan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati. Atas skill, profesionalisme, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola dana *shahibul maal*, maka *mudharib* akan mendapatkan imbalan. Dan atas modal yang telah dipergunakan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, maka *shahibul maal* akan memperoleh keuntungan.

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan *mudharabah* adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung atau investor atau nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan *mudharabah*. Sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana adalah 40%. (Wiyono,2005:62)

#### 6. PSAK No. 105 tentang bagi hasil *mudharabah*.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 paragraf 11 (2007:105.2) dijelaskan sebagai berikut:



Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Contoh metode bagi hasil lihat tabel II.1

**Tabel II.1**  
**Contoh Metode Bagi Hasil**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	Laba bruto ( <i>gross profit margin</i> )
Beban	25	
Laba (rugi) netto	10	Bagi laba ( <i>profit sharing</i> )

*Sumber: PSAK No. 105*

## **F. Mudharabah**

### **1. Pengertian *mudharabah***

Menurut Algagoud dan Mervyn (2001:66) didefenisikan sebagai berikut:

Sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua belah pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, dimana pemilik modal menyerahkan 100% modalnya kepada pengusaha untuk dikelola dalam suatu proyek atau usaha sebagai bentuk kerjasama dalam *mudharabah*.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Tentang akuntansi *mudharabah*, didefinisikan sebagai berikut:

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

## 2. Jenis-jenis *mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Tentang akuntansi *mudharabah* dijelaskan mengenai jenis-jenis *mudharabah* sebagai berikut:

*Mudharabah* terdiri *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayadah* dan *mudharabah musytarakah*. (paragraf 06)

### Pengertian (paragraf 04)

- *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- *Mudharabah muqayadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.
- *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Dalam *mudharabah muqayadah*, contoh batasan antara (paragraf 07)

- a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya:
- b. Tidak menginvestasikan dananya dapat transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa: jaminan
- c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Dari pernyataan diatas dapat diambil penjelasan bahwa, *shahibul maal* (pemilik dana) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan *mudharabah*. Namun demikian, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat guna menghindarkan modalnya dari resiko kerugian kepada *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 105 Tentang akuntansi *mudharabah* paragraf 10 sebagai berikut:

Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian *financial* menjadi tanggungan pemilik dana. Kecuali jika ditemukannya adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Oleh karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal bank karena proporsi modal *shahibul maal* dalam *mudharabah* adalah 100%, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Namun demikian, ketentuan pembagian seperti itu hanya berlaku kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*.

#### **G. Akuntansi Mudharabah**

- Setoran tabungan mudharabah
 

Dr. Kas	xxx
Cr. Rekening Nasabah	xxx
  
- Setoran deposito mudharabah
 

Dr. Kas	xxx
Cr. Rekening nasabah	xxx
  
- Penarikan tabungan mudharabah
 

Dr. Rekening nasabah	xxx
Cr. Kas	xxx
  
- Penarikan deposito mudharabah
 

Dr. Rekening nasabah	xxx
Cr. Kas	xxx

#### **H. Contoh Transaksi Mudharabah**

Tanggal 1 agustus 20xx Bank menyetujui pembelian fasilitas *mudharabah mutlaqah* PT. Haniyah yang bergerak dibidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Plafond = Rp. 1.450.000.000,-
- b. Objek bagi hasil = pendapatan (gross profit sharing)
- c. Nisbah = 70% PT.Haniyah dan 30% BMS

- d. Jangka waktu = 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 20xx)
- e. Biaya administrasi = Rp.14.500.000,- (dibayar saat akad ditanda tangani)
- f. Pelunasan = pengembalian pokok diakhir periode

#### Saat Penandatanganan Akad Mudharabah

Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad *mudharabah* ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT. Haniyah dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

**Tabel II.2**  
**Contoh Akad Mudharabah**  
**(Dalam Rupiah)**

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
01/08/20xx	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000,-	
	Kr. Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan		1.450.000.000,-
	(izin tarik tanggal 10 Agustus 1.450.000.000,-)		
	Db. Kas/Rekening nasaba-PT.Haniyah	14.500.00,-	
	Kr. Pendapatan administrasi		14.500.000,-

#### Penyerahan Investasi Mudharabah

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12 disebutkan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset

non-kas kepada pengelola dana. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK 10 paragraf 13.a).

Misalkan tanggal 10 Agustus 20xx, BMS mencairkan pembiayaan Rp. 1.450.000.000,- untuk investasi *mudharabah*.

**Tabel II.3**  
**Contoh Akad Investasi Mudharabah**  
**(Dalam Rupiah)**

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
05/10/20xx	Db. Investasi mudharabah	1.450.000.000,-	
	Kr. Kas/Rekening nasabah		1.450.000.000,-
05/10/20xx	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000,-	
	Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000,-

#### Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berdasarkan PSAK paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sekiranya bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, bagian tersebut diakui sebagai piutang (PSAK 105 paragraf 24).

Berikut adalah realisasi laba bruto PT.Haniyah selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

**Tabel II.4**  
**Contoh Realisasi Laba Bruto**  
**(Dalam Rp)**

No	Bulan	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal pembayaran Bagi Hasil
1	Ags x1	20.000.000,-	6.000.000,-	10 Sep	10 Sep
2	Sep x1	50.000.000,-	15.000.000,-	10 Okt	10 Okt
3	Okt x1	45.000.000,-	13.500.000,-	10 Nov	10 Nov
4	Nov x1	40.000.000,-	12.000.000,-	10 Des	10 Des
5	Des x1	60.000.000,-	18.000.000,-	10 Jan	10 Jan
6	Jan x2	50.000.000,-	15.000.000,-	10 Feb	10 Feb
7	Feb x2	40.000.000,-	12.000.000,-	10 Mar	10 Mar
8	Mar x2	50.000.000,-	15.000.000,-	10 Apr	10 Apr
9	Apr x2	55.000.000,-	16.500.000,-	10 Mei	05 Mei
10	Mei x2	60.000.000,-	18.000.000,-	15 Jun	15 Jun

Transaksi diatas dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, seperti bagi hasil untuk bulan Ags, Sep, Okt, Nov, Des, Jan, Feb, Mar, Bentuk transaksinya adalah berikut ini:

**Tabel II.5**  
**Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 1**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/09/x1	Db. Kas/Rekening nasabah	6.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil		6.000.000,-

	mudharabah		
10/10/x1	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000,-
10/11/x1	Db. Kas/Rekening nasabah	13.500.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		13.500.000,-
10/12/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	12.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		12.000.000,-
10/01/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	18.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000,-
10/02/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	12.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		12.000.000,-
10/03/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000,-
10/04/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000,-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000,-

2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil seperti pada bagi hasil bulan April dan Mei Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang, Bentuk transaksinya adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6**

**Contoh Transaksi Penerimaan Bagi Hasil 2**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/x2	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	16.500.000,- -	



	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual		16.500.000,-
05/06/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	16.500.000,-	
		-	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		16.500.000,-
	Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual	16.500.000,-	
		-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		16.500.000,-
10/06/x2	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	18.000.000,-	
		-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual		18.000.000,-
15/06/x2	Db. Kas/Rekening nasabah	18.000.000,-	
		-	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000,-
	Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual	18.000.000,-	
		-	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000,-

### **I. Pinjaman Qardh (Dana Kebajikan)**

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank, dana kebajikan biasa juga disebut dana kebajikan. Pada PSAK No. 101 paragraf 75 “sumber dana kebajikan terdiri atas: infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan/hibah.

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam, akad qardh merupakan akad akad yang

memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BPRS**

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlilah Air Tiris disingkat BANK SYARIAH BERKAH. Berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaris H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal disetor Rp. 200 juta. Izin operasional diberikan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. Kep-197/KM 17/1996. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah Berkah memulai kiprahnya dipasar Air Tiris, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut antusias oleh masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran Islam.

Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya menghadapi rintangan dan kendala-kendala yang cukup berat. Paling terasa ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 yang sangat mempengaruhi kehidupan dan ekonomi masyarakat, tak terkecuali debitur bank sehingga banyak pembiayaan mengalami kemacetan. Namun dengan perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan, semua rintangan dan kesulitan diatasi walaupun dengan hasil yang belum optimal. Walaupun demikian, sejak awal pendiriannya Bank Syariah Berkah Alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dan membukukan keuntungan dari tahun ketahun. Sebagai lembaga keuangan syariah semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa

yang telah dipraktekkan oleh Bank-bank syariah yang ada, terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah di Indonesia.

Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 kantor pelayanan yaitu kantor pusat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 depan SMU 2 Air Tiris Kec. Kampar. Kantor pelayanan kas di Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. DI. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 depan Pasar Danau Bingkuang, Kec. Tambang, dan kantor kas yang berada di Jl. Soebrantas Km 13,5 Kec. Tampan, Panam kota pekanbaru.

Bank Syariah Berkah ini sudah berdiri sejak 1994 dan beroperasi sejak tahun 1996. Diantara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 3 kantor cabang yang berada di Islamic Centre Bangkinang, Pasar Danau Bingkuang dan Jl. Soebrantas Pekanbaru.

#### 1. Perkembangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Sampai saat ini pembiayaan yang diberikan juga masih menggunakan akad *murabahah*, namun penerapan prinsip syariahnya masih bisa dibilang kurang. Meskipun demikian Bank tidak surut langkah untuk melanjutkan misinya. Sambil memperbaiki kinerja serta manajemen perusahaan. Hal ini seiring dengan makin stabilnya perekonomian masyarakat terutama pedagang kecil. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah nasabah dari tahun ketahun.

Pembukaan kantor pelayanan kas di Danau Bingkuang kecamatan Tambang yang beroperasi pada tanggal 23 Juni 2003 memberikan kontribusi untuk meningkatkan sosialisasi pada tahun 2003, maka bank melakukan

kerjasama dengan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) untuk kerja sama penyaluran dana (*Channeling*).

Dalam sepanjang sejarah Bank Syariah ditahun 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan aset sebesar 102% yakni dari 1,628 milyar pada Desember 2003 menjadi 3,295 milyar akhir tahun 2004. Perkembangan terakhir sampai pada Juni 2005, bank lebih meningkatkan pemasaran dan sosialisasi yang direalisasikan dengan pembukaan kantor kas di Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2005 dan kantor pelayanan kas di Islamic Centre Bangkinang.

2. Visi dari BPRS adalah:

Menjadikan BPRS unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

3. Misi dari BPRS adalah:

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
- b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.
- c. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhoi Allah SWT.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang Islami.

#### 4. Karakteristik Bank Syariah:

##### a. Landasan Hukum

Berdasarkan Al Qur'an, Hadist, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hukum positif.

##### b. Kelembagaan

Memiliki: -Dewan Pengawas Syariah sehingga terhindar dari praktek Riba.

-Dewan Komisaris.

##### c. Insentif

Diberikan dengan sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*).

##### d. Laporan Keuangan (*Cash Basis*).

##### e. Erat kaitannya antara Sektor Moneter dan Sektor Real.

#### 5. Nilai-nilai yang tertanam di BPRS adalah:

a. Taat pada syariah Islam, undang-undang dan hukum yang berlaku.

b. Menjunjung tinggi etika bisnis Islam

c. Bertindak dan berperilaku profesional

d. Menghargai karyawan sebagai bagian integral untuk kemajuan perusahaan

e. Berkembang dengan masyarakat

f. Bersikap mandiri dan non-partisan

#### 6. Produk-produk yang ada di BPRS adalah:

##### a. Tabungan

##### 1. Tabungan Berkah

2. Tabungan Tarbiyah (pendidikan)
3. Tabungan Arafah (Haji)
4. Tabungan Qurban

b. Deposito Mudharabah (Bagi Hasil)

1. 1 Bulan
2. 3 Bulan
3. 6 Bulan
4. 12 Bulan

7. Penyaluran Dana (pembiayaan) yang ada adalah:

1. Murabahah (Jual-Beli)

Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah dan lain-lain.

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik dan pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.

3. Al Qard (Pinjaman Kebajikan)

Pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan menghasilkan manfaat dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif dan pinjaman bersifat sosial tanpa keuntungan.

## **B. Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi dalam pengertian statis merupakan suatu wadah atau tempat bekerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis organisasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk organisasi yang baik akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dari tiap-tiap perusahaan dan juga pada tujuan yang akan tercapai, disamping itu dalam pemilihan struktur organisasi tersebut tergantung pada segi penilaian efektif tidaknya bentuk struk tersebut bagi perusahaan yang bersangkutan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah pada gambar III.I. Berdasarkan struktur organisasi perusahaan dapat diuraikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain sebagai berikut:

### **1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)**

- a. Mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi.
- b. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada Direksi dalam satu periode kepengurusan.
- c. Mendapatkan pembagian *Deviden* yang diperoleh dalam satu periode.



## 2. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawasi dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut sesuai dengan syariah atau tidak.

## 3. Komisaris

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan anggaran yang telah dibuat dan disetujui oleh RUPS.
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan atau permohonan diluar dari batas dan wewenang direksi
- c. Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai dengan fungsinya.

## 4. Direksi

Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) menetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

## 5. Bagian Operasional

Menghasilkan barang dan jasa, mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasional dan sistem transformasi, dan mengkaji pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasional.

#### 6. Bagian Personalia

Melakukan koordinasi pengawasan, pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai, koordinasi pangkat dan jabatan, penggajian dan kesejahteraan, tindakan disiplin, pengarahan, serta pendidikan dan karir.

#### 7. SPI (satuan pengawasan intern)

Membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikannya.

#### 8. Bagian Marketing

Memasarkan produk/jasa, melakukan penjualan dan sebagainya.

#### 9. Pembukuan

Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasi (pembukuan), serta memberikan laporan berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

#### 10. Pimpinan Kantor Kas

Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pelayanan dan pemasaran yang progresif, berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian, mengupayakan keamanan bank terutama aktivitas kantor kas yang berada dibawah wewenangnya.

#### 11. Bagian Umum

Bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran operasi bank, pemeliharaan, pengamanan aset bank, pelayanan tamu serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.

#### 12. ADM Pembiayaan dan Legal

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan ADM dan dokumentasikan pembiaian serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dari sisi mutu pada kegiatan penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 13. Kasir

Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari atau kepada nasabah atau pihak lain, mengatur, menyusun dan menyimpan uang, melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik kas kepada menejer operasional serta melakukan input transaksi kas atau pencatatan lainnya.

#### 14. Account Officer

Melaksanakan pemasaran (penyaluran dan penghimpunan dana), menjaga portopolio dan kondisi pembiayaan tetap pada kondisi lancar serta menyelesaikan pembiayaan bermasala yang dikoordinir dengan manejer pemasaran dan atau direksi.

## 15. Asisten Umum

Melaksanakan kegiatan pengamanan aset bank, kebersihan dan kenyamanan kantor, pelayanan tamu serta membantu kegiatan dan kelancaran seluru aktifitas bank terutama pekerjaan pada bagian umum.

### C. Aktivitas Perusahaan

Sesuai dengan fungsinya, BPRS Berkah Dana Fadhlillah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, selain itu juga tersedia jasa lainnya.penghimpunan dana tersebut dalam bentuk produk simpanan seperti tabungan dan deposito, sedangkan penyalur dana tersedia dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *Qardhul Hasan*. Adapun produk-produk usaha BPRS antara lain:

#### 1. Produk Penghimpunan Dana (simpanan)

##### a. Tabungan *Wadi'ah*

Agar tidak jadi simpang siur serta kesalan dalam input data, maka tabungan *wadi'ah* dibagi menjadi 2 yaitu:

##### 1. *Wadi'ah Qordiyu*

Adalah tabungan atau titipan murni yang berasal dari individu atau kelompok badan hukum yang melakukan pembiayaan *murabahah* umum dengan sistem angsuran bulanan, setiap nasabah pembiayaan harus membuka tabungan *wadi'ah* ini sebagai sarana pendebetan saat pembiayaan angsuran pembiayaan.

## 2. *Wadi'ah Bakulan*

Tabungan *wadi'ah bakulan* hampir sama dengan tabungan *wadi'ah Qordiyu*, hanya saja tabungan *wadi'ah bakulan* harus dibuka untuk nasabah pembiayaan elektronik baik dengan angsuran bulanan maupun mingguan.

### b. Tabungan *Mudharabah*

Adalah simpanan masyarakat baik individu atau Badan Hukum dimana bank sebagai *Mudharabah* (pengelola), dengan bagi hasil antara bank dan nasabah 35:65, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Tabungan *mudharabah* pada BPRS dikelompokkan dalam 3 bagian:

#### 1. Tabungan *mudharabah* umum

Tabungan ini dikhususkan untuk simpanan dari masyarakat/bada hukum lainnya secara umum termasuk juga mahasiswa.

#### 2. Tabungan Haji/Umrah

Tabungan haji penarikannya saat akan menunaikan haji hal ini bank bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI)

#### 3. Tabungan Pelajar (*Tilmizun*)

Tabungan ini dikhususkan bagi sekolah dasar (SD) sampai tingkat sekolah menengah (SMA) dengan setoran pertama Rp. 10.000,- minimal setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

c. Deposito Investasi *Mudharabah*

Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum yang hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu deposito dan bagi hasil tertentu. Jangka waktu deposito dan bagi hasil antara bank dan nasabah adalah: deposito 1 bulan 40:60, deposito 3 bulan 43:57, deposito 6 bulan 50:50, deposito 12 bulan 55:45.

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat ada 2 jenis, antara lain:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank, bank memberikan amanat kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank. Kemudian bank ini menjual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan (*price mark up*).

2. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Adalah pemberian dana kepada orang lain yang dapat ditanggguh atau diminta sesuai dengan perjanjian tanpa imbalan. Kebijakan ini biasanya diberikan kepada naabah pengusaha kecil dimana akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan sistem jual-beli.

GAMBAR III.I.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akuntansi Mudharabah**

Produk penyaluran dana yang terdapat pada BPRS Berkah adalah mudharabah dengan mengikuti konsep syariah, dimana dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga dalam penghimpunan tabungan maupun investasi masyarakat ataupun untuk transaksi pembiayaan.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugiannya ditanggung oleh pihak pertama.

Menurut PSAK No. 105 paragraf 11 tentang pembagian hasil usaha atau bagi laba, jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah dengan laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian hasil usahanya adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam penentuan bagi hasilnya Bank menggunakan total pendapatan usaha. Seharusnya Bank menerapkan pembagian hasil usahanya seperti yang telah di jelaskan pada PSAK No. 105 paragraf 11 bahwa pembagian hasil usahanya berdasarkan laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).



Seperti yang terdapat pada contoh kasus berikut (Daftar wawancara terlampir) :

Jika pendapatan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 bulan Rp. 6.891.949,- dan total dana pihak ketiga deposito jangka waktu 1 bulan Rp. 266.250.000,- dan memiliki deposito nominal Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan (3 maret 20xx – 30 april 20xx) dengan nisbah deposan 31% dan bank 69%. Berapa pendapatan bagi hasil yang diperoleh ?

Jawab:

$$\text{Rp}(10.000.000,- : 266.250.000,-) \times \text{Rp. } 6.891.949,- \times 31\% = \text{Rp } 80.244,-$$

Seperti pada contoh kasus perusahaan menggunakan total pendapatan usaha dalam menghitung bagi hasilnya ini akan berpengaruh dengan cara perhitungan bagi hasilnya. Pihak BPRS mengaku menerapkan sistem perhitungan bagi hasilnya dengan laba bruto (gross profit). Seperti yang telah diteliti perusahaan menggunakan total pendapatan usaha.

Jika perusahaan ingin menerapkan bagi hasil dengan cara laba bruto (gross profit) seharusnya pihak perusahaan menghitungnya dengan cara laba bruto (gross profit), bukan dengan cara total pendapatan usaha. Kalau perhitungan bagi hasil dengan cara seperti ini bisa jadi pendapatan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana tidak sesuai dengan akad dan margin yang di dapat. Jadi, pihak perusahaan harus menerapkan bagi hasil yang sesuai dengan PSAK supaya nantinya tidak merugikan antara pemilik dana dan pengelola dana.

## **B. Penyajian Dana Syirkah Temporer**

Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana, berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 25 “dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima.” Pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya. Yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian entitas syariah. Dana syirkah temporer juga tidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham. Dana syirkah temporer dalam pencatatan dineraca dipisahkan antara dana dari bukan bank dan dana syirkah temporer dari bank, kalau dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank digabungkan dalam pencatatannya maka akan berpengaruh terhadap bagi hasil usaha perusahaan, karena kalau digabungkan perusahaan akan sulit menghitung keuntungan dan kerugian dana

tabungan dan deposito yang dari bank dan dari bukan bank. Maka dari pada itu perusahaan sebaiknya memisahkan pencatatan antara dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank ini karena akan lebih memudahkan bagi perusahaan untuk menentukan seberapa besar investasi yang didapat dari bank dan dari bukan bank dan lebih memudahkan untuk mengetahui keuntungan yang akan dibagi hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara (Daftar wawancara terdaftar) dana investasi terikat yang dari bank pada tabungan mudharabah pada tahun 2010 berjumlah Rp 4,865,225.00- dan 2011 berjumlah Rp 5,876,420.00-, dan deposito mudharabah dari dana investasi terikat yang dari bank pada tahun 2010 berjumlah Rp 698,652,00- dan 2011 berjumlah Rp 615,222.00-. Selanjutnya dana investasi terikat yang dari bukan bank pada tabungan mudharabah pada tahun 2010 berjumlah Rp 2,038,208.00- dan 2011 berjumlah Rp 4,404,467.00-, dan deposito mudharabah dari dana investasi terikat yang dari bukan bank berjumlah Rp 584,213.00- dan 2011 berjumlah Rp 445,328.00-. Dapat dilihat pada tabel IV.1 :

**Tabel IV.1**  
**Neraca Setelah dikoreksi**

No	POS-POS	Posisi Dec-11	Posisi Dec-10
	<b><u>AKTIVA</u></b>		
1	Kas	441,314.00	163,654.00
2	Giro Bank Indonesia		
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4	Penempatan Pada Bank Lain	2,589,969.00	2,219,218.00
5	PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(9,320.00)	(6,464.00)
6	Surat Berharga Yang Dimiliki		
7	Piutang Ib	11,619,299.00	9,604,496.00
8	PPAP- Piutang iB	(160,744.00)	(101,160.00)

9	Piutang iB Lainnya	43,132.00	23,480.00
10	PPAP-Piutang iB Lainnya	(217.00)	(86.00)
	Pembiayaan Ib	157,066.00	-
11	PPAP- Pembiayaan iB	(785.00)	-
14	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	31,497.00	10,791.00
15	Biaya Dibayar Dimuka	67,627.00	100,128.00
16	Agunan yang diambil alih	249,054.00	259,898.00
17	PPAP- Agunan Diambil Alih	(77,988.00)	(46,646.00)
18	Aktiva Istishna	-	-
19	Termin Istishna	-	-
19	Aktiva Tetap dan Investaris	843,623.00	705,955.00
20	Akumulasi penghapusan Aktiva Tetap -/-	(702,201.00)	(586,395.00)
21	Aktiva lain-lain	32,511.00	31,544.00
	<b>Jumlah</b>	<b>15,118,837.00</b>	<b>12,378,413.00</b>
	<b>PASIVA</b>		
1.	Dana Simpanan iB	400,856.00	343,096.00
2.	Kewajiban Segera Ib Lainnya	39,509.00	37,504.00
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-	-
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	-	-
5.	Surat Berharga Ib Yang Diterbitkan	-	-
6.	Kewajiban Lain-lain	647,417.00	1,401,129.00
	Pinjaman Yang Diterima	-	-
7.	Modal Pinjaman	-	-
8.	Dana Investasi Tidak Terikat		
	a. Dari Bank :		
	Tabungan Mudharabah	5,876,420.00	4,865,225.00
	Deposito Mudharabah	615,222.00	698,652.00
	b. Dari Bukan Bank		
	Tabungan Mudharabah	4,404,467.00	2,038,208.00
	Deposito Mudharabah	445,328.00	584,213.00
9.	Ekuitas		
	a. Modal Disetor	1,132,490.00	1,132,490.00
	b. Tambahan Modal Disetor	1,087,333.00	1,005,753.00
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	d. Cadangan	121,900.00	108,701.00
	e. Saldo Laba (Rugi)	347,895.00	163,442.00
	<b>Jumlah</b>	<b>15,118,837.00</b>	<b>12,378,413.00</b>

### **C. Pinjaman Qardh (Dana Kebajikan)**

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah. Dana kebajikan juga bias disebut dana Qardh, PSAK 59 dan PAPSII menggunakan istilah Qardh dan bukan menggunakan istilah Dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 Paragraf 75 “ Sumber dana kebajika terdiri atas : Infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non- halal, dan sumbangan / hibah”.

Secara terminologi, Qardh berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya dan diganti pada suatu saat. Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad Qardh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atan dana yang dipinjam oleh nasabah.

Transaksi qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi pihak BPRS untuk memfasilitasi berbagai keperluan BPRS dalam hal: pemenuhan tanggung jawab sosial BPRS untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh BPRS, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif

pendek, dan sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidentil.

Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber pinjaman qardh dari eksternal bank berasal dari dana infak, sedekah, dan sumber non-halal, sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari internal bank adalah ekuitas bank syariah. Pinjaman qardh dengan sumber dana internal biasanya digunakan untuk bantuan sosial terhadap pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan bank syariah antara lain, pegawai bank sendiri, nasabah deposito yang butuh uang tetapi tidak dapat mencairkannya, dan dana nasabah yang mengonversi pinjaman dari konvensional ke syariah. Adapun pinjaman qardh dengan sumber dana eksternal biasanya digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi.

Pinjaman dana Qardh ini berpengaruh terhadap neraca BPRS karena pinjaman qardh bisa menambah asset bagi pihak BPRS. Akan tetapi, pihak BPRS tidak memasukan pinjaman dana Qardh kedalam neraca, pihak BPRS hanya memasukan kedalam laporan sumber dan penggunaan Qardh. Seperti terlihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh**

No	URAIAN	CATATAN	2010	2011
1.	Sumber Dana Qardh pada Awal		26,531	19,334
2.	Periode			
	Sumber Dana Qardh	Qardh denda	-	-
	a. Infaq dan shadaqah		33	846
	b. Denda	Qardh pend	6,816	6,736
	c. Sumbangan/Hibah	non-halal	-	-
	d. Pendapatan non-halal		2,068	455

	e. Lainnya		10,100	5,660
	Total Sumber Dana		<b>19,017</b>	<b>13,697</b>
3.	Penggunaan Dana Qardh			
	a. Pinjaman		14,850	6,100
	b. Sumbangan		526	400
	c. Lainnya		1,000	-
	Total Penggunaan		<b>16,376</b>	<b>6,500</b>
4.	Kenaikan (penurunan) sumber atas		2,641	7,197
5.	pengunaan			
	Sumber dana Qardh pada akhir periode		29,172	26,531

*Sumber : Dana Berkah Fadhlillah*

Seharusnya, selain dibuat pada laporan sumber dan penggunaan Qardh BPRS juga memasukan pinjaman Qardh ini kedalam laporan neraca perusahaan. Seperti terlihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Neraca Setelah dikoreksi**

No	POS-POS	Posisi Dec-11	Posisi Dec-10
	<b><u>AKTIVA</u></b>		
1	Kas	441,314.00	163,654.00
2	Giro Bank Indonesia		
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4	Penempatan Pada Bank Lain	2,589,969.00	2,219,218.00
5	PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(9,320.00)	(6,464.00)
6	Surat Berharga Yang Dimiliki		
7	Piutang Ib	11,619,299.00	9,604,496.00
8	PPAP- Piutang iB	(160,744.00)	(101,160.00)
9	Piutang iB Lainnya	43,132.00	23,480.00
10	PPAP-Piutang iB Lainnya	(217.00)	(86.00)
	Pembiayaan Ib	157,066.00	-
11	PPAP- Pembiayaan iB	(785.00)	-
	Pinjaman Qardh	14,850.00	6,100.00
14	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	31,497.00	10,791.00
15	Biaya Dibayar Dimuka	67,627.00	100,128.00

16	Agunan yang diambil alih	249,054.00	259,898.00
17	PPAP- Agunan Diambil Alih	(77,988.00)	(46,646.00)
18	Aktiva Istishna	-	-
19	Termin Istishna	-	-
19	Aktiva Tetap dan Investaris	843,623.00	705,955.00
20	Akumulasi penghapusan Aktiva Tetap -/-	(702,201.00)	(586,395.00)
21	Aktiva lain-lain	32,511.00	31,544.00
	<b>Jumlah</b>	<b>15,133,687.00</b>	<b>12,384,513.00</b>
	<b>PASIVA</b>		
1.	Dana Simpanan iB	400,856.00	343,096.00
2.	Kewajiban Segera Ib Lainnya	39,509.00	37,504.00
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-	-
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	-	-
5.	Surat Berharga Ib Yang Diterbitkan	-	-
6.	Kewajiban Lain-lain	647,417.00	1,401,129.00
	Pinjaman Yang Diterima	-	-
7.	Modal Pinjaman	-	-
8.	Dana Investasi Tidak Terikat		
	b. Dari Bank :		
	Tabungan Mudharabah	5,876,420.00	4,865,225.00
	Deposito Mudharabah	615,222.00	698,652.00
	b. Dari Bukan Bank		
	Tabungan Mudharabah	4,404,467.00	2,038,208.00
	Deposito Mudharabah	460,178.00	590,313.00
9.	Ekuitas		
	f. Modal Disetor	1,132,490.00	1,132,490.00
	g. Tambahan Modal Disetor	1,087,333.00	1,005,753.00
	h. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	i. Cadangan	121,900.00	108,701.00
	j. Saldo Laba (Rugi)	347,895.00	163,442.00
	<b>Jumlah</b>	<b>15,133,687.00</b>	<b>12,483,513.00</b>



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Akuntansi Mudharabah**

Dalam menentukan cara perhitungan bagi hasil usahanyaperusahaan masih melakukan kesalahan pencatatan, yaitu: perusahaan menghitung bagi hasil usahanya tidak mengikuti prosedur yang telah diterapkan pada PSAK No. 105 tetapi perusahaan menghitung bagi hasilnya dengan cara menggunakan total pendapatan usaha (omset).

##### **2. Dana Syirkah Temporer**

Penyajian dana syirkah temporer yang dibuat oleh perusahaan belum sesuai dengan PSAK, karena perusahaan mencatat dana syirkah temporer yang dari bukan bank dan dari bank dalam laporan neraca digabungkan, semestinya dana syirkah temporer dari bukan bank dan dari bank pencatatannya terpisah.

##### **3. Pinjaman Qardh**

Tiap perusahaan hanya memasukkan dana qardh ke dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Seharusnya BPRS juga memasukkan kedalam laporan Neraca,karena akan menambah aset BPRS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, berikut ini saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Agar dalam cara menghitung bagi hasil usahanya sesuai dengan PSAK yang telah diterapkan maka pihak perusahaan harus lebih mendalami lagi isi-isi yang terdapat dalam PSAK No. 105.
2. Perusahaan dalam mencatat dana syirkah temporer harus lebih hati-hati lagi seperti pencatatan dana syirkah temporer dari bukan bank dan dari bank. Perusahaan bukan hanya harus teliti dengan dana syirkah temporer ini saja tetapi perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mencatat laporan-laporan yang lain.
3. Perusahaan kedepannya harus mencatat bagi hasil yang belum dibagikan kedalam laporan keuangan supaya tidak terjadi penyelewengan dana nantinya dan perusahaan harus memperhatikan lagi dalam pencatatan sudah sesuai dengan PSAK atau belum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algagoud, M. Latifa dan Mervyn k. Lewis, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Serambi, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, dkk, 2002, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, Ekonesia, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Quran Dan Terjemahan, 2008, Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Hosen, Nadrattuzaman, 2006, ( *PSEKES* ) *Lembaga – Lembaga Bisnis Syaria'ah*, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail, 2009, *Akuntansi Bank: Teori Aplikasi Dalam Rupiah*, Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kholil, TM Husni, 2007, *Kumpulan materi Pelatihan : Accounting For Syariah Banking*, Bank Riau, Riau.
- Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, 2005, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2. PT. Salemba Emban Patria., Jakarta.
- Muhammad, Rifqi, 2008, *Akuntansi Keuangan Syariah, konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid, 2009, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, 2011, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahimsyah, M.B, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aprindo, Jakarta.
- Rustam, Bambang Rianto, 2008, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Mumtaz Cendekia Adhitan, Pekanbaru.

- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2006, *Memahami Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2006, *Research Methods for Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Penerbit EKONESIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Soemitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Edisi Revisi. Cetakan Ke-4. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, Heri dan Dendi Yogi Prabowo, 2004, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Wiyono, Slamet, 2005, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto, 2002, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Yahya, Rizal, Dkk, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.